

Pengaruh Tingkat Ketergantungan, Opini Audit, Ukuran Legislatif dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia

Gea Ananda¹, Yevi Dwitayanti², Sarikadarwati³

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
anandagea507@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how the disclosure of provincial government financial reports in Indonesia is influenced by the level of dependence, audit opinion, legislative size, and independence ratio. This study uses secondary data and a quantitative approach. This study was conducted in all 34 provinces in Indonesia for the period 2021-2023 with a sample size of 102. Financial reports in the form of Audit Result Reports (LHP) are used as a data source for this study which are obtained through the official website of the BPK RI through the pages www.bpk.go.id and www.puskapol.fisip.ui.ac.id to obtain the source of the number of members of the Regional People's Representative Council (DPRD). The sample selection technique in the study used an approach using purposive sampling. The data analyzed using SPSS software version 26. The results of this study individually Dependence Level, Audit Opinion and Legislative Size have an effect on the Disclosure of Provincial Government Financial Reports in Indonesia. Meanwhile, the Independence Ratio does not show any effect on the Disclosure of Provincial Government Financial Reports in Indonesia.

Keywords: *Dependence Level, Audit Opinion, Legislative Size, Independence Ratio, Disclosure of Local Government Financial Reports.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan, opini audit, ukuran legislatif, dan rasio independensi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pendekatan kuantitatif. Kajian ini dilakukan di seluruh 34 Provinsi yang ada di Indonesia untuk periode 2021-2023 dengan jumlah sampel sebanyak 102. Laporan keuangan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini yang diperoleh melalui situs resmi BPK RI melalui laman www.bpk.go.id dan www.puskapol.fisip.ui.ac.id untuk memperoleh sumber jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Teknik pemilihan sampel pada penelitian menggunakan pendekatan menggunakan *purposive sampling*. Data yang dianalisis menggunakan *Software SPSS* versi 26. Hasil penelitian ini secara individual Tingkat Ketergantungan, Opini Audit dan Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sedangkan, Rasio Kemandirian tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Kata kunci: Tingkat Ketergantungan, Opini Audit, Ukuran Legislatif, Rasio Kemandirian, Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

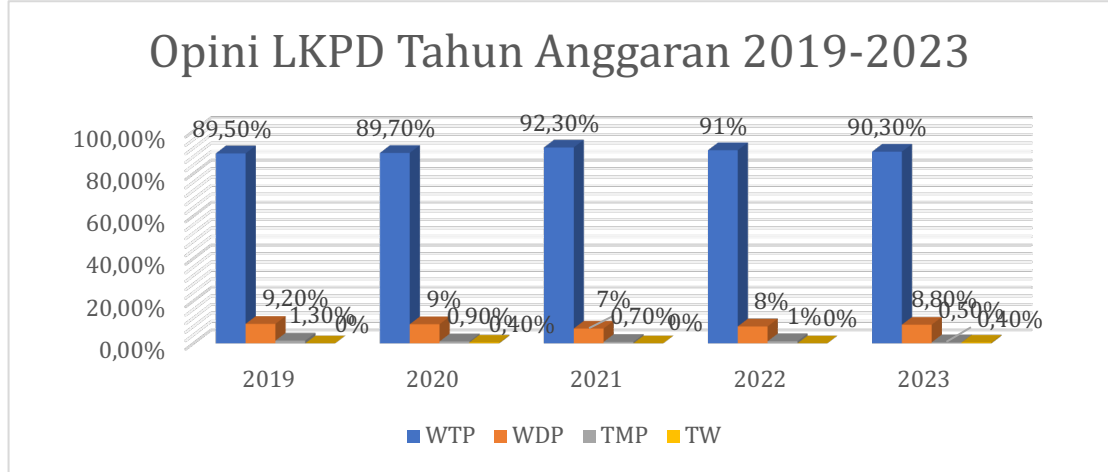
PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintah. Di Indonesia, pemerintah daerah dipisahkan menjadi tiga kategori yaitu pemerintahan kota, kabupaten, dan provinsi. Setiap pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi tersebut memiliki pemimpin di dalam daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwasanya unsur penyelenggaraan pemerintah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah. UU No. 22 Tahun 1999. Pemberian kewenangan tersebut bertujuan untuk dapat mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diterapkan dalam sistem desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada desentralisasi fiskal ini dalam hal pengelolaan keuangan, termasuk sumber pendapatan, belanja daerah, dan aset. Pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, laporan keuangan ini menyajikan laporan keuangan secara lengkap terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Pemerintah harus melakukan pengungkapan atau penyajian dalam laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab atas tata kelola sumber daya dan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Utami & Sulardi, 2019). Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwasanya pengungkapan laporan keuangan harus disajikan secara lengkap (*full disclosure*). Ada dua kategori pengungkapan laporan keuangan yaitu pengungkapan yang diwajibkan (*mandatory*) dan pengungkapan yang sukarela (*voluntary*). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan secara sukarela atau tidak sebagai kewajiban untuk memberikan semua informasi yang relevan kepada pengguna laporan, sedangkan pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Priharjanto & Wardani, 2017). Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengukur tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia, hasilnya menunjukkan belum ada yang mengungkapkan secara penuh. Rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebesar 60,42% (Utami & Sulardi, 2019), 64% (Setyowati, 2016), dan 41,76% (Hendriyani & Tahar, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan LKPD oleh pemerintah daerah masih tergolong rendah, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Setyowati (2016), Rendahnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat berdampak pada opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan opini berupa

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP). Berikut grafik di Gambar 1 yang menunjukkan perolehan opini LKPD tahun anggaran 2019-2023:



Gambar 1. Opini LKPD Tahun Anggaran 2019-2023

Sumber: www.bpk.go.id, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 1, data opini audit WTP di Indonesia selama tahun anggaran 2019-2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yaitu 89,50% pada tahun 2019, 89,70% pada tahun 2020, Opini WTP tertinggi mencapai 92,30% pada tahun 2021, 91% pada tahun 2022, dan 90,30% pada tahun 2023. Meskipun demikian, masih banyak pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP, TMP, dan TW yang menunjukkan bahwasanya kualitas keuangan belum optimal. Opini ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyajian informasi keuangan yang telah dilakukan. Opini yang kurang baik dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah, seperti transparansi, kelengkapan data, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keuangan perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih akurat, transparan, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain opini audit, dorongan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Menurut Anggara & Cheisviyanny (2020) Jumlah dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau provinsi menunjukkan tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam upaya mengawasi seberapa baik pemerintah daerah menggunakan dana tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi akan meminta lebih banyak pengungkapan laporan keuangan. Disisi lain, rasio kemandirian juga memiliki hubungan dengan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh daerah. Hal ini dikarenakan daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar cenderung menunjukkan transparansi lebih baik karena adanya tekanan dari masyarakat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

Faktor lain yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah adalah ukuran legislatif daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berperan sebagai lembaga pengawas dalam proses pengelolaan dan penganggaran keuangan daerah. Menurut Finakesti et al. (2022) banyaknya anggota legislatif maka semakin meningkat pula proses kontrol yang akan dilakukan legislatif. Hal ini dapat meningkatkan tekanan terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Penelitian terdahulu mengenai tingkat ketergantungan, opini audit, ukuran legislatif, dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang bervariasi. Anggara & Cheisviyanny (2020), Pandansari (2016), Finakesti et al. (2022) menemukan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan. Sebaliknya, penelitian Priharjanto & Wardani (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan. Selain itu, Priharjanto & Wardani (2017), Naopal et al. (2017) menemukan bahwa opini audit mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, penelitian Utami & Sulardi (2019), Budiarto & Indarti (2019) menemukan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh opini audit. Selanjutnya, Finakesti et al. (2022) menemukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh ukuran legislatif. Sebaliknya, Fuadi & Asmara (2020) menemukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh ukuran legislatif. Selanjutnya penelitian Finakesti et al. (2022) menemukan rasio kemandirian mempengaruhi laporan keuangan pemerintah. Sebaliknya, penelitian Utami & Sulardi (2019), Fuadi & Asmara (2020) menemukan bahwa rasio kemandirian tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan hasil dari setiap peneliti terdahulu peneliti mencoba mengatasi ketidakkonsistenan hasil tersebut dengan variabel-variabel tersebut di Provinsi Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Ketergantungan, Opini Audit, Ukuran Legislatif, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan data sekunder dan pendekatan kuantitatif. Kajian ini dilakukan di seluruh 34 Provinsi yang ada di Indonesia untuk periode 2021-2023. Menurut Sugiyono (2017), variabel bebas (independen) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi, sementara variabel terikat (dependen) adalah yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Tingkat Ketergantungan (X_1), Opini Audit (X_2), Ukuran Legislatif (X_3), dan Rasio Kemandirian (X_4). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia (Y) merupakan variabel dependen penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) yang diperoleh melalui situs resmi BPK RI melalui laman www.bpk.go.id dan www.puskapol.fisip.ui.ac.id untuk memperoleh sumber jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Teknik pemilihan sampel pada penelitian menggunakan pendekatan menggunakan *purposive sampling*. Data yang dianalisis menggunakan *Sotware* SPSS versi 26.

Tabel 1. Operasional Variabel

N o	Variabel	Indikator	Sumber
1	Tingkat Ketergantungan (X ₁)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah $= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	Mahmudi (2017)
2	Opini Audit (X ₂)	WTP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 1	Utami & Sulardi (2019)
3	Ukuran Legislatif (X ₃)	Ukuran Legislatif = Jumlah Anggota DPRD	Finakes ti et al. (2022)
4	Rasio Kemandirian (X ₄)	$= \frac{\text{Pedapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$	Mahmudi (2017)
5	Pengungkapan LKPD (Y)	Disclosure Pengungkapan LKPD $= \frac{\text{Pengungkapan dalam SAP}}{\text{Pengungkapan dalam SAP}} \times 100\%$	Finakes ti et al. (2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dengan menggunakan variabel seperti rata-rata (mean), simpangan baku, nilai maksimum, dan minimum, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan ringkasan data penelitian. Berikut Tabel 1 yang merupakan hasil uji analisis statistik deskriptif.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tk. Ketergantungan	102	.26	.93	.5751	.15999
Opini Audit	102	.09	.33	.3206	.04682
Uk. Legislatif	102	.21	.48	.3425	.06059
Rs. Kemandirian	102	.07	2.79	.8709	.62360
Pengungkapan LKPD	102	.27	.59	.4438	.06459
Valid N (listwise)	102				

Sumber: *Output* diolah dari SPSS, 2025

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2 menampilkan temuan uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04316401
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.037
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: *Output* SPSS, diolah peneliti (2025)

Hasil uji normalitas dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 ($p > 0,05$). Dengan demikian, residual model regresi terdistribusi normal dan terpenuhi salah satu dari asumsi klasik yang diperlukan dalam regresi linier.

Uji Multikolonieritas

Berikut hasil uji multikolonieritas yang disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tk. Ketergantungan	.114	8.798
	Opini Audit	.897	1.115
	Uk. Legislatif	.591	1.691
	Rs. Kemandirian	.115	8.728
a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD			

Sumber: *Output* SPSS, diolah peneliti (2025)

Hasil uji multikolonieritas memiliki nilai tolerance >0.10 dan VIF <10 , hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Temuan uji autokorelasi yang menggunakan uji *Breusch-Godfrey Test* adalah sebagai berikut yang disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.047	.085		.550	.583
	Tk. Ketergantungan	-.015	.082	-.057	-.187	.852
	Opini Audit	-.030	.098	-.033	-.305	.761
	Uk. Legislatif	-.092	.102	-.131	-.903	.369
	Rs. Kemandirian	.002	.021	.033	.109	.914
	RES_AK	.169	.111	.172	1.528	.130

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: *Output* SPSS, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey untuk menguji autokorelasi. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel RES_AK sebesar 0,130 ($p > 0,05$). Berdasarkan kriteria pengujian, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah autokorelasi, sehingga asumsi klasik mengenai independensi residual terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 menampilkan hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.051	.047		1.089	.279
	Tk. Ketergantungan	-.042	.045	-.272	-.930	.355
	Opini Audit	.022	.054	.042	.407	.685
	Uk. Legislatif	.056	.052	.139	1.086	.280
	Rs. Kemandirian	-.020	.011	-.520	-1.781	.078

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: *Output* SPSS, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, uji heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan metode *Glejser*, dapat dilihat dengan melihat nilai signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut residual (ABS_RES). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari

0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini dan asumsi mengenai kesamaan varians residual terpenuhi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil dari uji regresi tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.587	.084		6.952	.000
	Tk. Ketergantungan	-.279	.081	-.690	-3.430	.001
	Opini Audit	.282	.099	.205	2.855	.005
	Uk. Legislatif	-.238	.094	-.223	-2.527	.013
	Rs. Kemandirian	.010	.021	.094	.470	.640

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber: *Output SPSS*, diolah peneliti (2025)

1. Nilai Konstanta (α) memiliki nilai sebesar 0,585. Artinya, apabila variabel Tingkat Ketergantungan, Opini Audit, Ukuran Legislatif, dan Rasio Kemandirian berada dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan, maka tingkat Pengungkapan LKPD berada pada angka sebesar 0,585 atau 58,5%.
2. Koefisien variabel Tingkat Ketergantungan memiliki nilai sebesar $-0,279$. Artinya, jika Tingkat Ketergantungan meningkat satu satuan, maka Pengungkapan LKPD akan menurun sebesar 0,279.
3. Koefisien variabel Opini Audit memiliki nilai sebesar 0,291. Artinya, jika kualitas opini audit meningkat satu tingkat (misalnya dari WDP menjadi WTP), maka Pengungkapan LKPD juga akan meningkat sebesar 0,291.
4. Koefisien variabel Ukuran Legislatif memiliki nilai sebesar $-0,238$. Artinya, jika ukuran legislatif (jumlah anggota DPRD) meningkat satu satuan, maka Pengungkapan LKPD justru akan menurun sebesar 0,238.
5. Koefisien variabel Rasio Kemandirian memiliki nilai sebesar 0,010. Artinya, jika Rasio Kemandirian meningkat satu satuan, maka Pengungkapan LKPD juga akan meningkat sebesar 0,010.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 6 di atas untuk melihat hasil uji statistik t. Berikut ini penjelasan mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Variabel Tingkat Ketergantungan (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar $-3,430$ dengan signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$), yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y.

2. Variabel Opini Audit (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,855 dengan signifikansi 0,005 ($p < 0,05$), artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.
3. Variabel Ukuran Legislatif (X3) menunjukkan nilai t hitung sebesar -2,527 dengan signifikansi 0,013 ($p < 0,05$), artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y.
4. Variabel Rasio Kemandirian (X4) menunjukkan nilai t hitung 0,470 dengan signifikansi 0,640 ($p > 0,05$), artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji Statistik F)

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.233	4	.058	30.056	.000 ^b
	Residual	.188	97	.002		
	Total	.421	101			

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD
 b. Predictors: (Constant), Rs. Kemandirian, Opini Audit, Uk. Legislatif, Tk. Ketergantungan

Sumber: *Output SPSS*, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji F, nilai F-hitung 30,056 > F-tabel 2,465 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Tingkat Ketergantungan (X1), Opini Audit (X2), Ukuran Legislatif (X3), dan Rasio Kemandirian (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744 ^a	.553	.535	.04404

a. Predictors: (Constant), Rs. Kemandirian, Opini Audit, Uk. Legislatif, Tk. Ketergantungan
 b. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber: *Output SPSS*, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,553 menunjukkan bahwa 55,3% variabel dependen, yaitu Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari Tingkat Ketergantungan, Opini Audit, Ukuran Legislatif, dan Rasio

Kemandirian. Sedangkan sisanya, sebesar 44,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Tingkat Ketergantungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Arah hubungan yang terbentuk adalah negatif, yang menunjukkan bahwa semakin suatu daerah bergantung pada penerimaan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, justru tingkat pengungkapan laporan keuangannya cenderung lebih rendah
2. Opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Arah hubungan yang terbentuk adalah positif, ini menjelaskan bahwa semakin baik opini audit yang diberikan kepada suatu provinsi (misalnya opini WTP), maka semakin tinggi pula kecenderungan provinsi tersebut dalam menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan akuntabel.
3. Ukuran Legislatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Arah hubungan yang terbentuk adalah negatif, ini menunjukkan semakin besar jumlah anggota legislatif di suatu provinsi, tidak serta-merta meningkatkan tingkat keterbukaan informasi keuangan, bahkan dalam beberapa kasus justru berbanding terbalik
4. Rasio Kemandirian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, tingkat kemandirian fiskal yang tinggi tidak menjamin bahwa daerah tersebut akan menyampaikan laporan keuangan secara lebih terbuka.
5. Secara bersama-sama atau simultan variabel Tingkat Ketergantungan, Opini Audit, Ukuran Legislatif dan Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.

Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan hasil tingkat pengungkapan provinsi di Indonesia belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan serta evaluasi berkala terhadap kualitas pelaporan, khususnya dalam hal pemenuhan item-item pengungkapan wajib.
2. Penelitian ini terbatas pada provinsi di Indonesia selama periode 2021-2023. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar cakupan wilayah dan tahun anggaran diperluas agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan dapat di generalisasikan secara lebih luas.
3. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti ukuran

pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia (IPM), dan kekayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2, No 1, 2162–2184.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1). www.jateng.bps.go.id
- Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6.
- Fuadi, M. Z., & Asmara, J. A. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Penerimaan Dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(1), 1.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, Mei*, 25–33.
- Mahmudi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3rd ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7, No 1, 56–68.
- Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Informasi Keuangan Dan Akuntansi*, 97–110.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *ESENSI*, 6(1).
<https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>

Utami, S. R., & Sulardi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 253-263.

www.bpk.go.id

www.puskapol.fisip.ui.ac.id